

# Komnas HAM Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Wiranto

CNN Indonesia | Sabtu, 11/05/2019 06:10 WIB



Komnas HAM minta Jokowi evaluasi Wiranto. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meminta Presiden [Joko Widodo](#) agar mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan [Wiranto](#). Menurut Choirul, Wiranto kerap mengambil tindakan yang keliru, salah satunya pembentukan tim asistensi hukum.

"Ada baiknya memang Presiden mengevaluasi kinerja Menkopolhukam, Karena beberapa kali offside dalam konteks konstitusi," ucap Choirul di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (10/5).

Choirul mengatakan Wiranto pernah mengabaikan perintah Jokowi soal penyelesaian pelanggaran HAM. Terakhir, Wiranto membentuk tim asistensi hukum untuk memantau ucapan dan tindakan yang melanggar pemilu pascapemilu.

Choirul menegaskan bahwa Wiranto tidak perlu membentuk tim tersebut. Menurutnya ada kepolisian yang telah memiliki wewenang untuk mengusut kasus hukum.

**Lihat juga:** [Wiranto Sebut Komnas HAM Tak Paham soal Tim Hukum Nasional](#)

Selain itu, Choirul juga mengatakan tim tersebut juga sama dengan Wiranto membawa aspek penegakkan hukum ke ranah politik. Choirul menilai hal itu jelas langkah keliru yang dilakukan Wiranto sebagai menteri.

"Ingin menyelesaikan kegaduhan politik pasca pemilu, malah intervensi penegakkan hukum. Apa kewenangan Menkopolhukam. Mengurusi penegakkan hukum? Enggak ada. Ya polisi dan kejaksaan," ucap Choirul.

"Harusnya Menkopolhukam itu buka puasa bareng lah. Safari Ramadhan ke tokoh tokoh gitu lho. Bukan malah mengancam tokoh-tokohnya," lanjutnya.

**Lihat juga:** [Komnas HAM Menentang Langkah Wiranto Bentuk Tim Hukum](#)

Sebelumnya, Wiranto membentuk tim asistensi hukum. Tim tersebut dibentuk berdasarkan keputusan Menkopolhukam No 38 tahun 2019.

Ada 24 anggota yang tergabung di dalamnya. Ada ahli hukum, hingga pejabat kepolisian seperti Direktur Tindak Pidana Umum dan Direktur Tindak Pidana Sibes Mabes Polri.

Tim tersebut bertugas melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pascapemilu 2019. Tugas lainnya yakni memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kewenangan.

(bmv/DAL)

## Komnas HAM Menentang Langkah Wiranto Bentuk Tim Hukum

CNN Indonesia | Jumat, 10/05/2019 17:31 WIB



Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- [Komnas HAM](#) menentang Menteri Koordinator Bidang Politik

Hukum dan Keamanan [Wiranto](#) membentuk tim asistensi hukum untuk memantau dan mengkaji ucapan serta tindakan tokoh.

Komnas HAM menganggap tim tersebut berpotensi memasung kebebasan berpendapat warga negara di alam demokrasi.

Hal itu diutarakan Komnas HAM melalui konferensi pers khusus untuk menanggapi pembentukan tim asisten hukum, pada Jumat (10/5).

**Lihat juga:** [Sah, Tim Asistensi Hukum Wiranto Bekerja hingga 31 Oktober](#)

"Tim asisten hukum Kemenkopolhukam yang memiliki tugas seolah sebagai quasi-penyelidik dikhawatirkan akan mereduksi kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan, yang berarti mencederai praktik demokrasi dan juga hak asasi manusia," tutur Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan.

Rizal menyebut demokrasi memang menerbitkan suasana yang riuh. Meski begitu, Rizal mengatakan bahwa demokrasi yang dinikmati sejauh ini merupakan hasil perjuangan anak-anak bangsa pada 1998 silam. Karenanya, harus dijaga dan dirawat bersama secara arif dan bijaksana.

Dia pun menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 menghendaki negara Indonesia untuk melindungi warga negara. Bukan sebaliknya.

Dijelaskan pula dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Rizal juga menyinggung Pasal 25 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Semua beleid tersebut, kata dia, memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat.

"Bukan menebar ancaman dan menciptakan atmosfer ketakutan bagi warga negara yang mempunyai pikiran dan pendapat berbeda," ucap Rizal.

**Lihat juga:** [Respons Mahfud MD Diajak Wiranto Masuk Tim Hukum Nasional](#)

Menko Polhukam Wiranto pada hari ini resmi membentuk tim asistensi hukum di bawah lembaga yang dipimpinnya.

Pembentukan didasari atas Keputusan Kemenkopolhukam No 38 tahun 2019. Ada 24 orang yang tergabung di dalamnya. Terdiri dari ahli hukum serta pejabat kepolisian.

Tim tersebut bertugas melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pascapemilu 2019. Tugas lainnya yakni memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai kewenangan. **(bmw/wis)**